

**DISEMINASI LAPORAN AKHIR PENDAMPINGAN
PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Pekanbaru, 3 November 2022

PIC Kabupaten Indragiri Hulu
Yessi Marlina, S.Gz, MPH, Dietisien



Latar Belakang

STUNTING

Umur Sama Tetapi Tinggi Badan Berbeda)

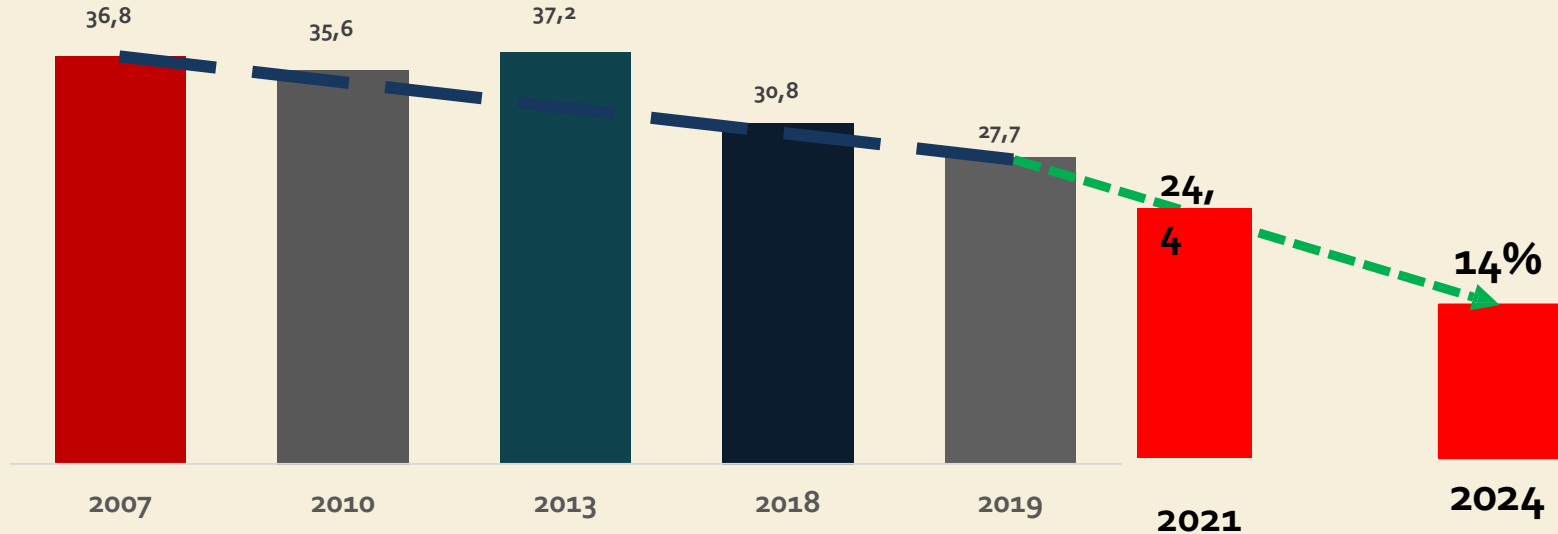
Bahaya *Stunting* dapat dicegah sejak dini dengan memperhatikan kehamilan dengan pola pengasuhan 1.000 HPK.

Apa yang dimaksud *Stunting*?

“Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (BALITA) akibat kekurangan Gizi Kronis dan Infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)”

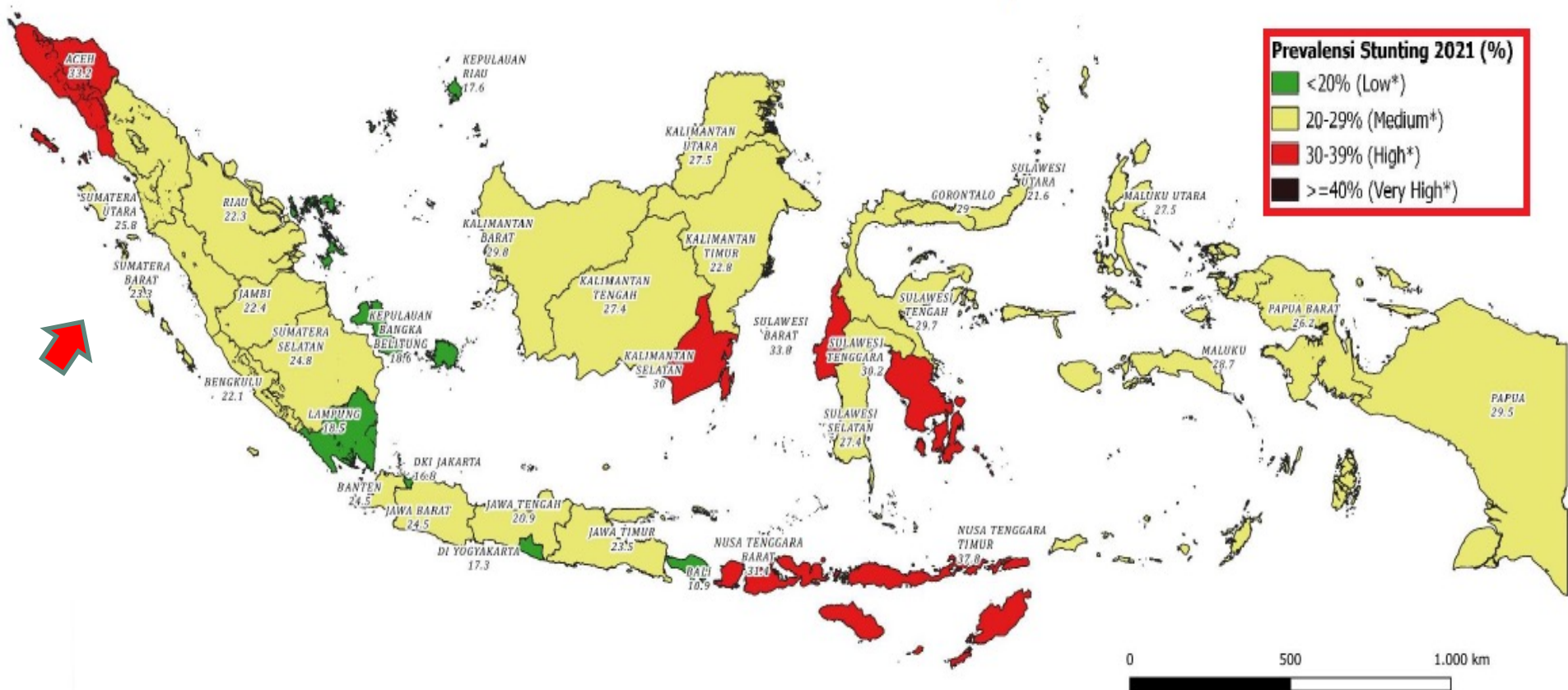


Prevalensi Stunting Nasional (%)



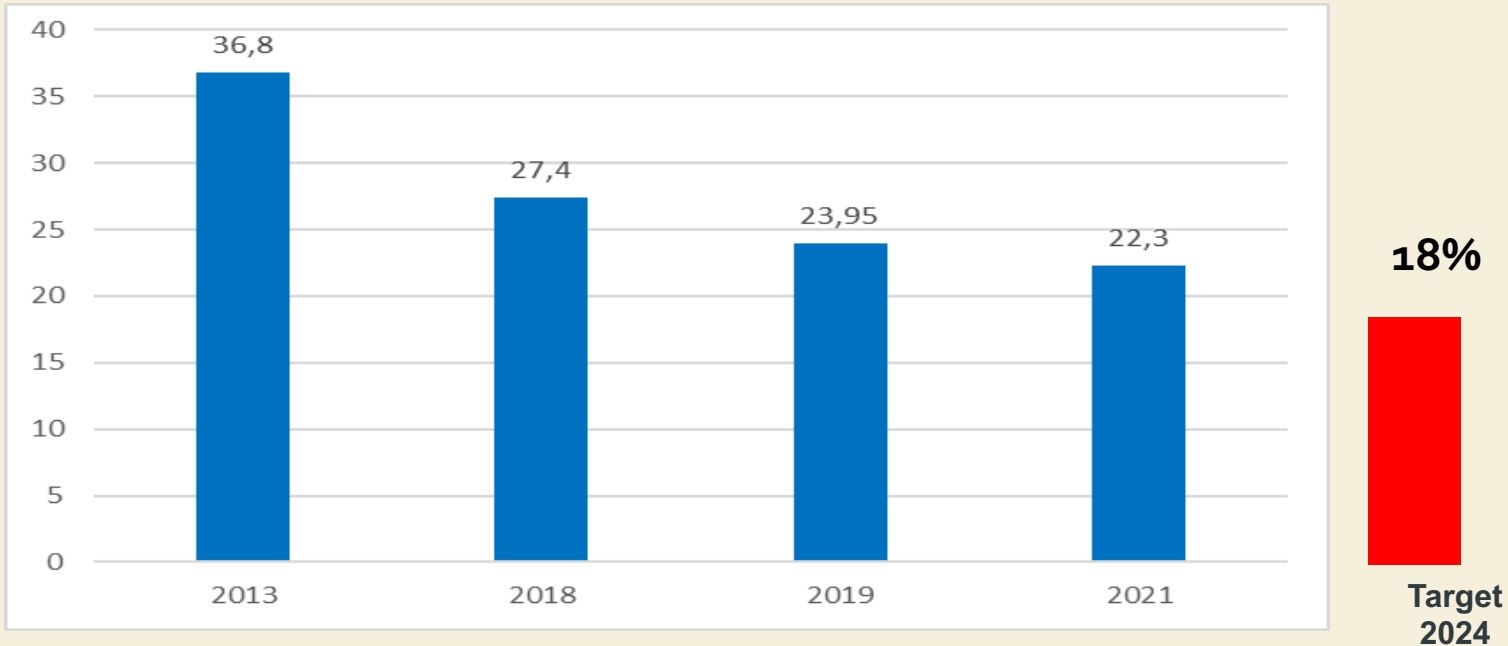
- Prevalensi Balita Stunted pada tahun 2021 sebesar 24,4% (sumber data: SSGI),
- Rata-rata penurunan nasional 1,4% per tahun (baseline 2013)

PREVALENSI BALITA STUNTED, SSGI 2021



Prevalensi Stunting di Provinsi RIAU: 22,3%

Prevalensi *Balita Stunted* Provinsi Riau (%)



- Prevalensi Balita Stunted pada tahun 2021 sebesar 22,3% (sumber data: SSGI)
- **Rata-rata penurunan sebesar 1,6% per tahun**
- Target RPJMD Riau tahun 2024 = 18% (dengan rata-rata penurunan **2% per tahun**)

Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Riau (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2013	2018	2019	2021
1	Kuantan Singingi	38,7	24,6	29,55	22,4
2	Indragiri Hulu	40,5	32,2	29,67	23,6
3	Indragiri Hilir	39,9	32,2	27,43	28,4
4	Pelalawan	44,4	25,5	22,97	21,2
5	Siak	24,4	21	27,43	19
6	Kampar	32,1	32,1	23,07	25,7
7	Rokan Hulu	58,9	27,3	24,37	25,8
8	Bengkalis	26,9	32,3	21,07	21,9
9	Rokan Hilir	27,3	38,1	28,87	29,7
10	Kepulauan Meranti	37	29,9	25,1	23,3
11	Kota Pekanbaru	34,7	16	18,58	11,4
12	Kota Dumai	34,1	17,3	11,59	23

Sumber Data :
Riskesdas (2013-2018)
SSGBI (2019)
SSGI (2021)



LOKASI FOKUS PENURUNAN

STUNTING



Tahun 2022 Seluruh Kab/Kota

(Sk Menteri PPN/Bappenas kep.10/m.ppn/hk/02/2021

TUJUAN

1. Melakukan Analisis Situasi dan Penyusunan Laporan di Tingkat Kabupaten
2. Memberikan rekomendasi dan advokasi kebijakan program kegiatan kepada pemda kabupaten dalam upaya percepatan penurunan stunting
3. Rekomendasi rencana kegiatan dan Policy Brief
4. Melakukan pendampingan tingkat Kabupaten INHU

Metode

- Kuantitatif : Data PK 21, Profil Dinas Kesehatan, Data BPS, Paparan Rembuk stunting dan lainnya
- Kualitatif : Wawancara terkait Data Analisis Situasi (sesuai Perdep Nomor 2 Tahun 2022 mengenai ketersediaan kebijakan percepatan penurunan stunting, Ketersediaan anggaran, SDM, data, dan efektivitas TPPS



HASIL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

DATA PROFIL KAB. INHU

- meliputi wilayah seluas 8,195.26 km² (819,826.00ha)
- Batas Wilayah:
Barat : Kab. Kuantan
Singingi
Timur : Kab. Indragiri Hilir
Utara : Kab. Pelalawan
Selatan : Kab. Muara Tebo,
Jambi
- Ibukota kabupaten ini Kota Rengat tetapi aktifitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 Km dari Kota Rengat.
- Tdd 14 kecamatan, 178 desa dan 16 kelurahan

Peta Kab Indragiri Hulu (INHU)



PENETAPAN LOKUS PENANGANAN STUNTING SE- PROVINSI RIAU TAHUN 2021 – 2022



Penetapan
Desa/Kelurahan
Lokus berdasarkan
Surat Keputusan
Bupati/Walikota

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KELURAHAN LOKUS STUNTING	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Rokan Hulu	10	31
2	Kampar	19	20
3	Pelalawan	11	13
4	Kepulauan Meranti	30	25
5	Rokan Hilir	16	15
6	Indragiri Hulu	10	10
7	Indragiri Hilir	15	40
8	Pekanbaru	15	20
9	Siak	15	20
10	Bengkalis	15	23
11	Dumai	6	6
12	Kuantan Singingi	-	8
	Jumlah	162	216

Sasaran dan Indikator Percepatan Penurunan Stunting

(Lampiran A Perpres 72/2021)



Layanan Intervensi Spesifik → 9 Indikator

- (%) ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.
- (%) ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) min. 90 tablet selama masa kehamilan.
- (%) remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
- (%) bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (%) anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
- (%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.
- (%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
- (%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.
- (%) balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap



Layanan Intervensi Sensitif → 11 Indikator

- (%) pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
- Cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (%) rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di kab/kota lokasi prioritas.
- Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan
- (%) target sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang Stunting di lokasi prioritas
- (%) kehamilan yang tidak diinginkan
- (%) rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kab/kota lokasi prioritas.
- Cakupan Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah.
- Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.
- Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.
- (%) desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free

● BKKBN ● KEMENKES
● KEMEN PUPR ● KEMENSOS



Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Perpres No. 72 Tahun 2021



Intervensi Spesifik

Indikator Sasaran	Target
1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90%
2. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80%
3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58%
4. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.	80%
5. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80%
6. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90%
7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90%
8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%
9. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%

Intervensi Sensitif

Indikator Sasaran	Target
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70%
2. Kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5%
3. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	90%
4. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100%
5. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90%
6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah.	112,9 juta penduduk
7. Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	90%
8. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	10 juta keluarga
9. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas.	70%
10. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	15.600.039 keluarga
11. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	90%

INTERVENSI SPESIFIK

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi = 67,9%

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif = 50,2%

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya = 76,8%

Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan = 75,3%

Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) = 69,1%

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi = 60,5%

Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) = 65,6%

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk = 11,3%

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap = 14,4%

INTERVENSI SENSITIF

Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan = tidak diketahui

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan = 7,6%

Cakupan calon (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen) = tidak diketahui

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kabupaten dan kota lokasi prioritas = 57,5%

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di Kabupaten dan kota lokasi prioritas = 61,1%

Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta) = 98,8%

INTERVENSI SENSITIF

Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan = tidak diketahui

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat =

Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan

Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) = 39%

MASTER ANSIT STUNTING KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa / Kelurahan Lokus Tahun 2023	JUMLAH KELURGA BERISIKO STUNTING	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	PERANAP	PERANAP	Peranap	731	65	12,24
2	BATANG PERANAP	SECANO JAYA	Punti Kayu	337	42	18,18
3	SEBERIDA	PANGKALAN KASAI	Pangkalan Kasai	717	16	1,20
4	BATANG CENAKU	LUBUK KANDIS	Anak Talang	268	15	20,83
5	BATANG GANSAL	BATANG GANSAL	Seberida	617	1	0,38
6	KELAYANG	KOTA MEDAN	Sungai Golang	141	18	22,78
7	PASIR PENYU	AIR MOLEK	Air Molek I	595	135	35,25
8	PASIR PENYU	AIR MOLEK	Candirejo	541	43	11,32
9	PASIR PENYU	AIR MOLEK	Kembang Harum	266	26	16,46
10	PASIR PENYU	AIR MOLEK	Batu Gajah	253	25	13,51
11	PASIR PENYU	AIR MOLEK	Sekar Mawar	471	41	14,96
12	SUNGAI LALA	SEI LALA	Kelawat	312	32	23,88
13	RENGAT BARAT	PEKAN HERAN	Redang	324	12	9,76
14	RENGAT	SIPAYUNG	Sekip Hulu	560	31	9,14
15	LIRIK	LIRIK	Sukajadi	140	15	22,39

Master Ansit 2022 (INHU)-1-6-22.xlsx

Penetapan Lokasi Fokus Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 Kabupaten Indragiri Hulu

Lokasi Fokus Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (STUNTING) Tahun 2021

No	Desa / Kelurahan Lokus Tahun 2021	Kecamatan	Puskesmas
1	Desa Baturijal Hulu	Peranap	Peranap
2	Desa Pauh Ranap	Peranap	Peranap
3	Desa Rawa Bangun	Rengat	Sipayung
4	Desa Batu Sawar	Rakit Kulim	Rakit Kulim
5	Desa Talang Gedabu	Rakit Kulim	Rakit Kulim
6	Desa Talang Suka Maju	Rakit Kulim	Rakit Kulim
7	Desa Kulim Jaya	Lubuk Batu Jaya	Kulim Jaya
8	Desa Redang Seko	Lirik	Lirik
9	Desa Pematang Jaya	Rengat Barat	Pekan Heran
10	Desa Bandar Padang	Seberida	Pangkalan Kasai

- Lokasi Fokus Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (STUNTING) Tahun 2022**

No	Desa / Kelurahan Lokus Tahun 2022	Kecamatan	Puskesmas
1	Pasar Kota	Rengat	Sipayung
2	Tanah Merah	Pasir Penyu	Air Molek
3	Serumpun Jaya	Pasir Penyu	Air Molek
4	Talang Durian Cacar	Rakit Kulim	Rakit Kulim
5	Talang Tujuh Buah Tangga	Rakit Kulim	Kota Baru
6	Kuala Lala	Sungai Lala	Sei. Lala
7	Rejosari	Lirik	Lirik
8	Lahai Kemuning	Batang Cenaku	Lubuk Kandis
9	Baturijal Hilir	Peranap	Peranap
10	Alang Kepayang	Rengat Barat	Pekan Heran

Hasil Kesepakatan Penentuan Lokasi Fokus Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hulu

No	Desa / Kelurahan Lokus Tahun 2023	Kecamatan
1	DESA ANAK TALANG	BATANG CENAKU
2	DESA SEBERIDA	BATANG GANSAL
3	DESA PUNTI KAYU	BATANG PERANAP
4	DESA SUKAJADI	LIRIK
5	KEL. AIR MOLEK I	PASIR PENYU
6	DESA CANDI REJO	PASIR PENYU
7	KEL. SEKAR MAWAR	PASIR PENYU
8	KEL. KEMBANG HARUM	PASIR PENYU
9	DESA BATU GAJAH	PASIR PENYU
10	KEL. PERANAP	PERANAP
11	DESA REDANG	RENGAT BARAT
12	DESA KELAWAT	SUNGAI LALA
13	DESA SUNGAI GOLANG	KELAYANG
14	KEL. SEKIP HULU	RENGAT
15	KEL. PANGKALAN KASAI	SEBERIDA

KEBIJAKAN PENDUKUNG

1. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab.Indragiri Hulu tahun 2022
2. Keputusan Bupati tentang Lokasi Fokus Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2021 dan 2022
3. Peraturan Bupati mengenai peran Desa dalam penurunan stunting

Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		
			PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN 2022	PAGU ANGGARAN 2023*)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	871.480.347,00	5.456.999.750,00	2.216.584.450,00
		Kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	871.480.347,00	5.456.999.750,00	2.216.584.450,00
		Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	809.137.640,00	300.000.000,00	1.370.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	62.342.707,00	299.999.850,00	617.713.450,00
		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	49.999.900,00	110.282.000,00
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	4.807.000.000,00	118.589.000,00
2	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	975.907.900,00	796.310.900,00	175.703.700,00
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	975.907.900,00	796.310.900,00	175.703.700,00
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	975.907.900,00	796.310.900,00	175.703.700,00

Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		
			PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN 2022	PAGU ANGGARAN 2023*)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.889.480.400,00	7.577.929.100,00	4.515.995.299,00
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.889.480.400,00	7.577.929.100,00	4.515.995.299,00
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		3.037.453.500,00	3.515.995.299,00
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.889.480.400,00	4.540.475.600,00	1.000.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	159.415.300,00	135.535.800,00	135.535.800,00
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	159.415.300,00	135.535.800,00	135.535.800,00
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	159.415.300,00	135.535.800,00	135.535.800,00

Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		
			PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN 2022	PAGU ANGGARAN 2023*)
5	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	212.255.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00
		kegiatan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	212.255.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00
		sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	212.255.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	391.893.800,00	809.495.200,00	1.918.000.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	391.893.800,00	809.495.200,00	1.918.000.000,00
		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan	355.805.900,00	567.495.200,00	653.000.000,00
		sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.087.900,00	242.000.000,00	1.265.000.000,00

Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		
			PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN 2022	PAGU ANGGARAN 2023*)
6	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	175.750.900,00	505.160.064,00
		Kegiatan penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota	-	175.750.900,00	505.160.064,00
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota	-	175.750.900,00	505.160.064,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	113.278.000,00	107.099.800,00	300.202.900,00
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	113.278.000,00	107.099.800,00	300.202.900,00
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota		107.099.800,00	-
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Pemdampingan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	113.278.000,00	-	300.202.900,00

Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		
			PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN 2022	PAGU ANGGARAN 2023*)
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	397.823.636,00	422.760.100,00	350.000.000,00
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	397.823.636,00	422.760.100,00	350.000.000,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	397.823.636,00	422.760.100,00	350.000.000,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	721.491.300,00	266.731.000,00	55.925.000,00
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	721.491.300,00	266.731.000,00	55.925.000,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (RAKORCAM), Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES) dan Mini Lokakarya (MINILOK)	709.655.300,00	230.193.000,00	33.550.000,00
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11.836.000,00	36.538.000,00	22.375.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	1.012.000.000,00	2.580.208.700,00	-
		Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.012.000.000,00	2.580.208.700,00	-
		Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	-	183.808.700,00	-
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	413.000.000,00	330.000.000,00	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (KADER) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	599.000.000,00	2.066.400.000,00	-
		TOTAL	7.745.025.683,00	18.518.821.250,00	10.373.107.213,00

KETERSEDIAAN ANGGARAN

Sumber Dana berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) dari BKKBN pusat dan BOK stunting dari DinKes

Analisis
GAP

Mampu mengoptimalkan dana yang ada untuk kegiatan2 percepatan penurunan stunting

Tantangan

Hambatan

- ❖ belum ada sumber dana lain selain dari pemerintah
- ❖ tidak diketahui daya serap anggaran
- ❖ Tidak ada informasi mengenai anggaran tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna

Peluang

OPD terkait sudah memiliki dana khusus penanganan stunting

KETERSEDIAAN SDM

- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) → **Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.229/III/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Indragiri Hulu**
- Tim Pendamping Keluarga (TPK) yg tdd Kader, Bidan, PKK.
- Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting

Jumlah Tim Pendamping Keluarga di Provinsi Riau

		JML TPK	PERSONIL		
TOTAL TPK : 3.558	KUANTAN SINGINGI	293	879	TOTAL SDM: 10.674	
	INDRAGIRI HULU	282	846		
	INDRAGIRI HILIR	381	1.143		
	PELALAWAN	199	597		
	S I A K	248	744		
	KAMPAR	493	1.479		
	ROKAN HULU	309	927		
	BENGGALIS	326	978		
	ROKAN HILIR	309	927		
	KEPULAUAN MERANTI	247	741		
	PEKANBARU	327	981		
	D U M A I	144	432		

TIM PENDAMPING KELUARGA

Unsur dalam Tim:

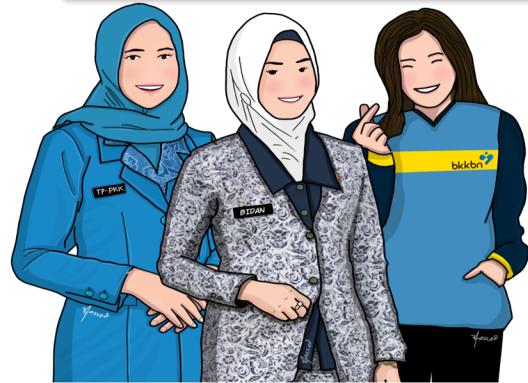
- ❑ Bidan atau nakes lainnya;
- ❑ Kader TP-PKK;
- ❑ Kader KB/Kader Pembangunan lainnya.

TUGAS :

Meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- penyuluhan;
- fasilitasi pelayanan rujukan,
- fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

Mendeteksi dini faktor resiko *Stunting* (spesifik & sensitif);



TIM PENDAMPING KELUARGA

KAB/KOTA	JUMLAH KELOMPOK TPK	JLH. TPK
INDRAGIRI HULU	282	846
TOTAL	282	846

TIM FASILITATOR TPK

KAB/KOTA	JUMLAH FASILITATOR
INDRAGIRI HULU	14
TOTAL	14

Sasaran Pendampingan Keluarga



Catin



Ibu Hamil



Pascapersalinan



Anak 0-5 Tahun



KETERSEDIAAN SDM PENDUKUNG

Terdapat tim audit stunting, tim satgas, nakes, TPK, dll

Analisis
GAP

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai stunting

Hambatan

Kolaborasi SDM antara tenaga kesehatan, ekonomi, social, dan dinas2 terkait serta masyarakat

Tantangan

Peluang

Kerja sama dengan perguruan tinggi setempat

KETERSEDIAAN DATA

- Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020, Pendataan Keluarga 2021 (PK21) BKKBN

Analisis
GAP

Hambatan

Sinkronisasi data antara data temuan di lapangan dengan data di pelaporan

kemudahan akses dalam memperoleh data dan kemampuan dalam mengolah data

Tantangan

Peluang

Data telah terdokumentasi dengan baik

Peran setiap Tingkatan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota serta memfasilitasi pembentukan **Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan dan Desa.**

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa melibatkan tenaga kesehatan (dokter/bidan/tenaga gizi), Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (**PKK**), **Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/kader** dan/atau unsur masyarakat lainnya.



EFEKTIFITAS TPPS

Sudah terbentuk TPPS Kabupaten, kecamatan (14), Desa/Kelurahan (194)
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah ditunjuk oleh Bupati

Analisis
GAP

Baru mulai terbentuk tahun 2022 ini sehingga belum terlihat jelas efektifitas TPPS ini

Hambatan

Koordinasi antara TPPS perlu dilakukan terencana, terukur dan terevaluasi dengan baik

Tantangan

Peluang

Semakin banyak OPD dan pihak swasta yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting dan adanya pendampingan Perguruan Tinggi

Integrasi RAN PASTI dan 8 aksi konvergensi

#1. Analisis situasi

1. Dilakukan penyesuaian form analisis situasi dari **20 menjadi 64 indicator**.
2. Sasaran **catin dan utamanya 1000 HPK**
3. Memetakan program dan kegiatan berdasarkan perpres dan RAN PASTI

#3. Rembuk Stunting Kabupaten/Kota

Komitmen rencana aksi menjawab upaya pencapaian 64 indicator untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

#5. Pembinaan kader

1. Sinkronisasi tugas KPM, TPK & kader lainnya.
2. Legalitas dan peningkatan kapasitas KPM & TPK
3. Skema insentif

#7. Pengukuran & publikasi

1. Dilakukan pemantauan (tidak saja pertumbuhan) tetapi juga perkembangan balita dengan Kartu Kembang Anak (KKA). *KKA menjadi parameter gangguan perkembangan baduta/balita stunting.*
2. Menjadi bahan audit kasus stunting

Jan

Feb

Mar

Aprl

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

#2. Menyusun rencana kegiatan

Memasikan rekomendasi program & kegiatan hasil analisis situasi dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD

#4. Perbup/perwali ttg kewenangan desa

Berdasarkan hasil analisis situasi, min 10% APBDes, peran camat, penguatan kelembagaan (TPK, posyandu, BKB), capaian konvergensi layanan berbasis keluarga berisiko stunting*

#6. Manajemen data

1. Kebutuhan & kesenjangan data dari 64 indicator
2. Perluasan jangkauan & peningkatan kualitas surveilans keluarga berisiko stunting-elsimil & eppgbm
3. Berbagipakai data/interoperabilitas antar system data

#8 reviu tahunan

Fokus pada konvergensi tingkat keluarga dan rencana percepatan ke depan.

Kelembagaan dan Koordinasi di Daerah



Provinsi

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)



Kabupaten/Kota

Tim Percepatan Penurunan Stunting



Kecamatan

Koordinasi dipimpin oleh **Camat** melalui pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat



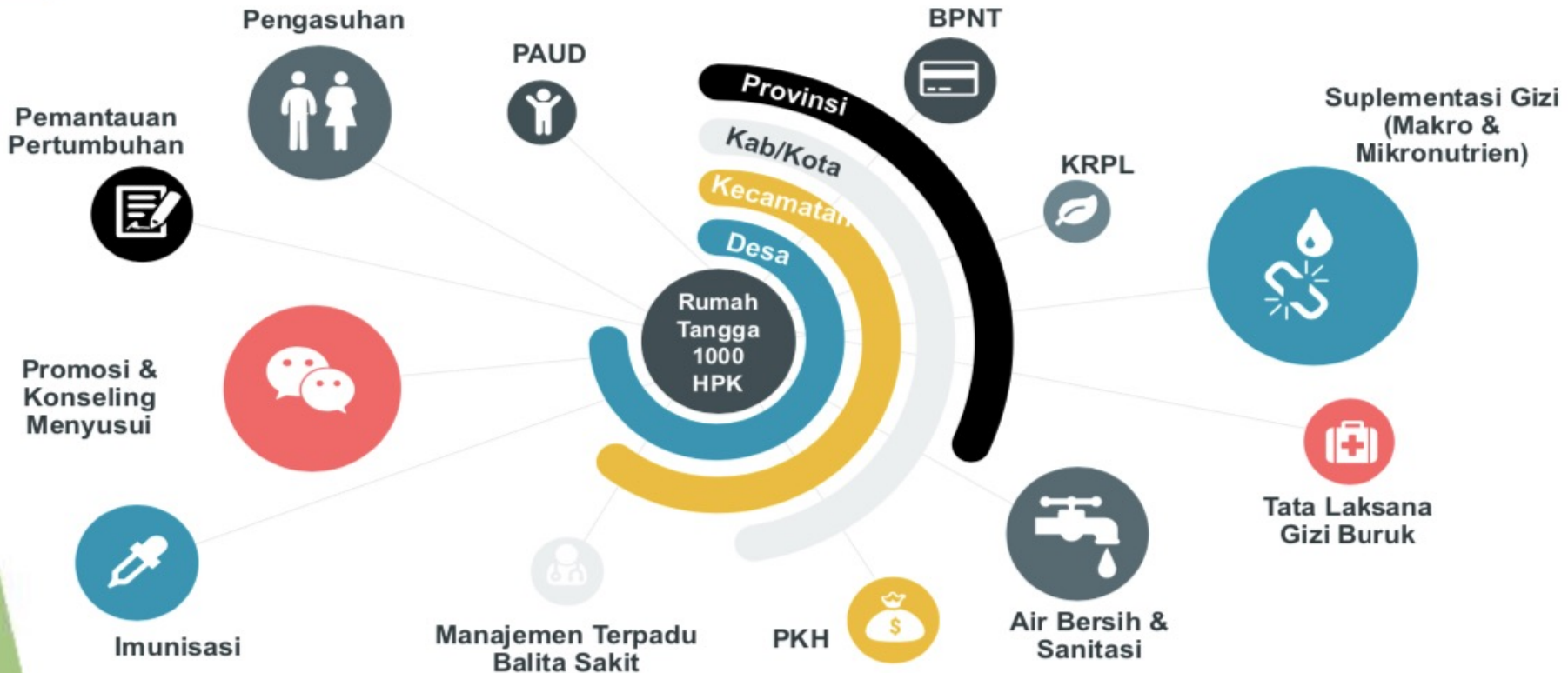
Desa

Kepala Desa menjadi penanggung jawab kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa



**Susunan keanggotaan tim disesuaikan dengan situasi & kebutuhan daerah, melibatkan lintas sektor dan stakeholders*

Pentingnya Konvergensi Intervensi pada Rumah Tangga 1000 HPK



Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Program dan Kegiatan

- Perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan rembuk stunting
- Sosialisasi hasil-hasil rembuk stunting kepada para stakeholder di Kab/Kota di berbagai media
- Keterlibatan Perguruan Tinggi setempat dalam program pencegahan stunting di Kabupaten/Kota.
- Perlu peningkatan pemahaman yang baik tentang stunting melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan serta kampanye komunikasi perubahan perilaku bagi masyarakat.

Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan

(termasuk dalam Perpres Percepatan Penurunan *Stunting*)

Penajaman Kegiatan dan Sasaran

- Diarahkan terutama pada **keluarga 1.000 HPK** (ibu hamil dan balita) dan keluarga beresiko *stunting*
- **Integrasi data** sasaran prioritas.
- Perluasan cakupan **intervensi spesifik minimal 90%**.

Penguatan Tata Kelola

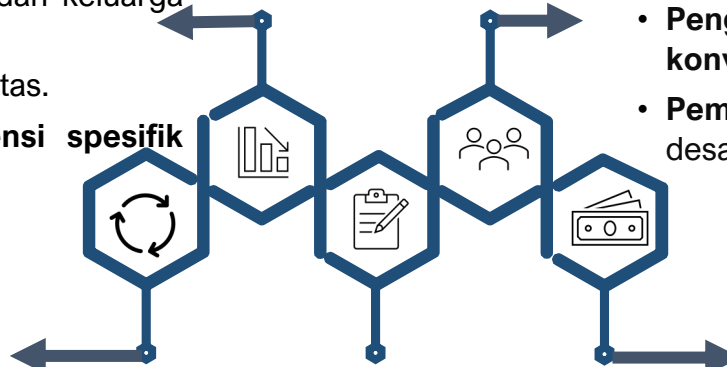
- Peran **BKKBN** sebagai ketua pelaksana/koordinator lapangan.
- **Pembagian peran BKKBN** (sebagai koordinator pelaksanaan di lapangan) & **Bappeda** sebagai koordinator perencanaan & penganggaran dalam Aksi Konvergensi di daerah.
- Sistem **monev terintegrasi**.
- **Penandaan** (*tagging*) **anggaran** & penilaian kinerja.

Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota

- Penetapan **target *stunting*** di setiap provinsi/kab/kota.
- **Penguatan pelaksanaan pendampingan 8 aksi konvergensi** yang dipantau oleh Kemendagri.
- **Pembentukan tim** di kab/kota sampai dengan desa.

Pembiayaan

- **Penguatan integrasi pembiayaan** melalui anggaran K/L dan DAK *stunting*.
- **Penguatan penganggaran APBD** dan dana desa.
- Insentif untuk daerah yang berhasil.
- Pelibatan **SUN Networks** (Dunia usaha, organisasi masy, PT dan organisasi profesi) di tingkat provinsi.



TERIMAKASIH